



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENEMBAKAN KKB TERHADAP ROMBONGAN KOMNAS HAM DI PAPUA

**Lisbet**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[lisbet.sihombing@dpr.go.id](mailto:lisbet.sihombing@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 27 April 2025, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menembak Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, beserta rombongan. Penembakan terjadi sekitar pukul 07.10 WIT pada saat Frits dan rombongan hendak turun ke Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Tidak ada korban akibat penembakan tersebut.

Frits dan rombongan berada di wilayah tersebut karena ikut serta dalam pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun. Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang sejak tanggal 18 Desember 2024 saat melakukan operasi penangkapan terhadap KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Ada dugaan bahwa Iptu Tomi Marbun hanyut pada saat hendak menyeberangi Sungai Rawara yang memiliki arus deras. Frits dan tim pencarian yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Jhony Isir, bersama dengan ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob serta Polres Teluk Bintuni telah berada di Kabupaten Teluk Bintuni sejak Senin, 21 April 2025. Tim Pencari hendak melanjutkan perjalanan menuju Distrik Moskona serta Mayerga.

Pada tanggal 28 April 2025 juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, dalam siaran persnya mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap aparat militer Indonesia serta Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. Menurut Sebby, penembakan ini merupakan peringatan agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara harus segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai bahwa penembakan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum. Oleh karena itu, TB Hasanuddin mengecam keras aksi penembakan tersebut. TB Hasanuddin menilai bahwa penembakan oleh KKB ini telah melewati batas dan membahayakan upaya penegak hukum serta perlindungan atas HAM di Papua karena pada saat penembakan, rombongan Komnas HAM Perwakilan Papua sedang menjalankan tugas negara.

Selain TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, juga mengutuk penembakan KKB tersebut. Dave menilai bahwa penembakan ini merupakan tindakan kriminal. Menurut Dave, OPM selama ini tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak mendorong adanya perdamaian. OPM hanya mengedepankan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Papua. Meskipun demikian, Dave tetap mendorong agar Pemerintah tetap melakukan pendekatan dialog yang baik.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Amelia Anggraini, pun menekankan pentingnya langkah tegas dari Pemerintah agar tidak tunduk terhadap aksi teror. Aksi teror dan serangan tersebut telah

berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Papua hidup ketakutan atas aksi teror dan serangan tersebut.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa penanganan persoalan di Papua tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab TNI, melainkan memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, TNI telah menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan KKB di Papua.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memantau langkah hukum TNI terhadap penembakan yang dilakukan oleh KKB dan meningkatkan pengamanan di Papua. Selain itu, Komisi I DPR RI mendukung upaya TNI untuk mengadakan pendekatan yang komprehensif dengan kementerian-kementerian lainnya agar insiden penembakan ini tidak akan terulang kembali. Pendekatan ini sangat penting dilakukan, baik dari sisi keamanan, sosial, maupun politik dan ekonomi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membangun daerah-daerah terpencil di Papua sehingga kesulitan masyarakat dapat diatasi. Di samping itu, Komisi I DPR RI dapat menghimbau TNI untuk mengingatkan pemerintah daerah setempat agar melibatkan masyarakat Papua dalam membangun daerahnya pada seluruh aspek baik sosial, politik, dan ekonomi.

## Sumber

dpr.go.id, 28 April 2025;  
*Media Indonesia*, 28 April 2025;  
 merdeka.com, 30 April 2025;  
 metrotvnews.com, 29 April 2025;  
 rmol.id, 30 April 2025;  
 tempo.co, 29 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making*